

**PEMANDANGAN
UMUM INDUSTRI
FILM INDONESIA**

2020

Catatan tim filmindonesia.or.id (FI)

Penyusunan laporan ini menggunakan referensi media massa dan data industri film sampai bulan November 2020. Sebelum penerbitan, Tim FI melakukan pemutakhiran data jumlah penonton film serta data bioskop dan layar menurut data yang terkumpul sampai 9 Februari 2021. Mengingat jumlah film beredar yang sangat sedikit, begitupun perolehan penonton, maka pemutakhiran data ini tidak mempengaruhi secara signifikan analisis yang telah dilakukan pada November 2020.



Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Prakata	6
Kilas Balik 2019: Perkembangan Stabil Meski Minus Lonjakan	8
Dampak Ekonomi-Sosial Pandemi dan Tindakan Solidaritas bagi Pekerja Film	10
Pandemi Covid-19 dan Produksi Film Indonesia	13
Pertumbuhan Bioskop dan Layar Di Tengah Pandemi	17
Layanan Platform Daring di masa Pandemi: Peluang Baru atau Peralihan Sementara?	22
Festival dan Kompetisi Film di Masa Pandemi: Minim Tatap Muka, Namun Semakin Terbuka	28
Epilog: Industri Film yang Hidup Bersama Pandemi	32

Daftar Grafik dan Tabel

Grafik:

Grafik 1. Jumlah total bioskop dan layar 2016 – 2020	18
Grafik 2. Pertambahan jumlah bioskop dan layar di Indonesia tahun 2018 – 2020	19
Grafik 3. Jumlah judul film Indonesia di platform menonton daring tahun 2020	22
Grafik 4. Jumlah judul film Indonesia di katalog platform menonton daring tahun 2020 menurut dekade produksi	23
Grafik 5. Perkiraan Jumlah Pelanggan Aktif Netflix Indonesia 2017-2020	24

Tabel:

Tabel 1. Jumlah penonton film per judul tahun 2017-2020 dibagi menurut akumulasi jumlah penonton	8
Tabel 2. Jumlah bioskop dan layar di Indonesia tahun 2019 & 2020 dibagi menurut lokasi	9
Tabel 3. Jumlah bioskop baru pada tahun 2020 menurut jaringan	18

Kata Pengantar

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Film adalah subsektor ekonomi kreatif yang memiliki ekosistem yang luas dan kompleks. Selain membutuhkan sumber daya beragam, meliputi manusia, alam, kreatifitas, dan teknologi, film juga selalu melibatkan subsektor ekonomi kreatif lainnya, seperti musik, desain, fesyen, atau kuliner. Lokasi tempat pembuatan film pun tak jarang menjadi destinasi pariwisata yang banyak diminati.

Kini film tak hanya berfungsi membangun identitas bangsa, tetapi kontribusi terhadap perekonomian juga semakin diperhitungkan. Dilansir oleh UNESCO institute of statistics sepanjang 2004-2017 produksi film telah tumbuh secara signifikan sebesar 64 persen. Di Indonesia, laju pertumbuhan PDB Film, Animasi dan Video tercatat meningkat tinggi dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, di tahun 2017 laju pertumbuhan subsektor tersebut mencapai angka yang cukup fantastik, yaitu 10,30 persen.

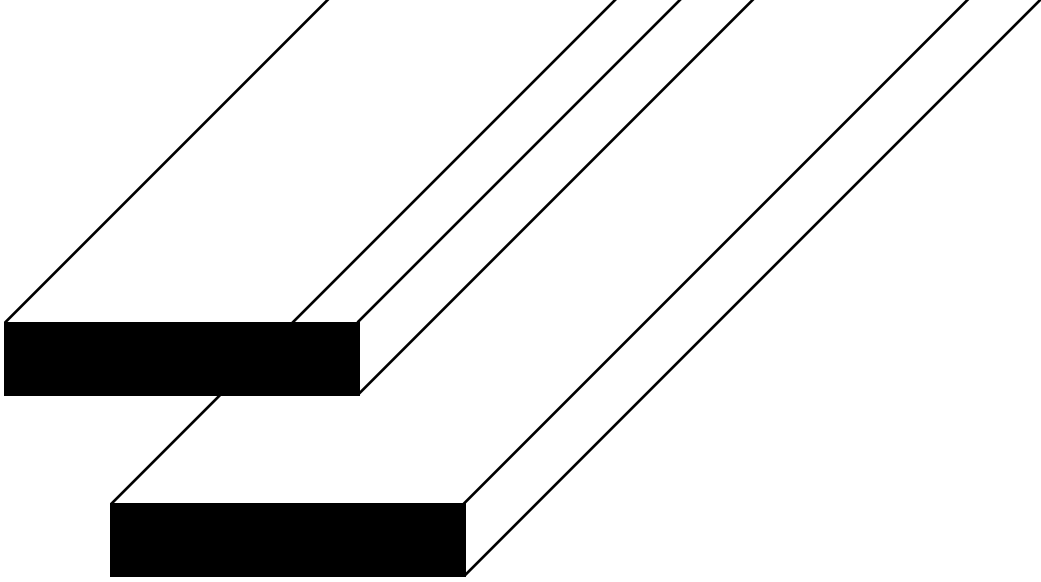
Sejak April 2020 sektor film di seluruh dunia mengalami pukulan berat karena pembatasan aktifitas sosial yang diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19. Produksi film dan penayangan di bioskop pun terhenti, akibatnya pertumbuhan sektor film di tingkat nasional pun mengalami gangguan. Tahun 2020, PDB Film, Animasi dan Video, diestimasi tumbuh negatif di angka 0,03 persen. Angka negatif ini perlu ditanggapi secara serius mengingat ada sekitar 42 ribu tenaga kerja yang terlibat langsung di subsektor ini.

Sebagai lembaga publik yang bekerja mengembangkan ekonomi kreatif, Kemeparekraf berkewajiban mendukung perkembangan film. Ketersediaan basis data memungkinkan pemangku kebijakan memahami pasang-surut industri film, sehingga dapat merencanakan kebijakan yang tepat.

Laporan Pandangan Umum Industri Film Indonesia 2020 dibuat untuk merekam dan mendeskripsikan kondisi industri film nasional di tengah pandemi Covid-19. Hasil publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan yang relevan untuk mendukung kelestarian industri film Indonesia.

Saya berharap bahwa penerbitan ini dapat merekam dengan baik masa amat sulit yang dialami oleh industri film dan menjadi referensi untuk pembuatan kebijakan lembaga kami dalam mendukung perkembangan industri ini untuk pulih kembali di masa depan.

Jakarta, Maret 2021
Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf
Wawan Rusiawan



Prakata

Tahun 2019 berjalan dengan pertumbuhan yang positif walaupun tidak ada lonjakan drastis dari sisi jumlah produksi film bioskop, perkembangan jumlah layar dan penonton, kalau dibandingkan dengan tahun 2018. Awal tahun 2020 pun dibuka dengan angka yang memberi rasa optimis, lebih dari 12,5 juta penonton membeli tiket bioskop pada kuartal pertama dari Januari sampai Maret. Walau turun 5 juta penonton dibandingkan kuartal pertama 2019, di mana bioskop beroleh 17,5 juta pembeli tiket, tapi jumlah film beredar pada awal 2020 lebih sedikit. Di kuartal pertama tahun 2020 ada 28 judul film Indonesia yang tayang di bioskop, sementara pada kurun yang sama tahun 2019 ada 36 judul. Jika dibagi rata-rata jumlah penonton tiap film, pada tahun 2019 angka rata-rata adalah 485.320 penonton. Sementara pada 2020, angka rata-rata ini adalah 446.982. Karena itu dapat dikatakan bahwa perolehan penonton tiap judul beredar pada awal 2020 hampir setara dengan tahun sebelumnya, walaupun harus dicatat bahwa ada penurunan jumlah penonton rata-rata per film sebanyak hampir 40 ribu.

Pada kuartal pertama 2020 ada harapan bahwa jumlah penonton akumulatif dari tahun 2019 sebanyak 51,9 juta paling tidak akan bisa disamai. Kalau dibuat perkiraan pendapatan kotor, tiap tiket bisa menghasilkan 40 ribu rupiah. Jadi pada tahun 2019 film Indonesia mengumpulkan pendapatan kotor sebesar 2,08 triliun.

Kalau pada 2015 Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa sumbangan industri film terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional hanya sebesar 0,16 persen, maka pada 2018 jumlahnya naik cukup tinggi menjadi 6,09 persen seperti dikutip artikel Detik Travel (27 Agustus 2020)¹. Peningkatan jumlah penonton dari 2018 menuju tahun 2019 memang tidak terlalu tinggi, selisihnya sebesar 700 ribu penonton, akan tetapi bisa dibilang bahwa pertumbuhan masih terus terjadi.

Ketika pada awal Januari 2020, tak lama setelah merayakan pergantian tahun, muncul berita soal wabah virus Corona di Wuhan, RRC, para pelaku industri film Indonesia belum menunjukkan kecemasan akan masa depannya. Dampak pandemi Covid-19 tidak seragam, ada pihak yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Ketua Asosiasi Produser Aprofri Edwin Nazir menaksir kehilangan potensi pendapatan industri film tahun 2020 mencapai 1,6 triliun rupiah hanya dari hilangnya potensi pendapatan tiket bioskop, belum memperhitungkan kerugian dari sisi pembengkakan biaya atau bahkan kerugian karena kegagalan produksi film. Di sisi lain ada pertumbuhan di sektor eksibisi film daring, yang lazim disebut Over The Top (OTT), baik yang didorong oleh perusahaan multinasional maupun yang tumbuh di lingkup domestik.

Sampai pertengahan Maret 2020, saat Presiden Joko Widodo menetapkan perlunya gugus tugas khusus untuk mempercepat penanganan pandemi sebagai bagian dari tragedi global, film Indonesia seperti *Mariposa*, produksi bersama Starvision dan Falcon Pictures, masih mengumpulkan lebih dari 740 ribu penonton dalam waktu kurang dari dua minggu tayang. Film *Milea: Suara dari Dilan* mengumpulkan 3,1 juta penonton dalam waktu empat minggu.

Baru kali ini industri perfilman Indonesia dilumpuhkan oleh sesuatu yang bukan tindakan manusia. Sepanjang sejarahnya sejak awal abad ke-20, industri film Indonesia memang tidak stabil perkembangannya dan selalu naik-turun, akan tetapi penyebabnya berasal dari perang, konflik politik atau kebijakan yang lebih membela monopoli peredaran film impor - dengan kata lain, bencana tindakan manusia. Kali ini, industri film di seluruh dunia mengalami kelumpuhan yang sama dan Indonesia tak terkecuali. Kalau divisualkan, keadaan tahun 2020 seperti seorang pendaki gunung yang berada di puncak, lalu tiba-tiba saja terjatuh terjun bebas. Di Indonesia perubahan drastis yang melumpuhkan ini, ironisnya, terjadi tak sampai dua minggu menjelang peringatan Hari Film Nasional pada 30 Maret.

1 Dadan Kuswaraharja, 'Wishnutama: Pembukaan Bioskop Geliatkan Dunia Perfilman', detik.com, 27 Agustus 2020, 15:49.

1. Kilas Balik 2019: Perkembangan Stabil Meski Minus Lonjakan

Jumlah film beredar di bioskop pada tahun 2019 tercatat sama dengan 2018, sebanyak 128 judul². Sepanjang 2019, berdasarkan tahun katalog terdapat 130 judul film yang beredar termasuk film *Humba Dreams* yang tayang perdana di Shanghai International Film Festival, namun belum tayang perdana di jaringan bioskop di Indonesia. Berdasarkan peredaran di jaringan bioskop terdapat 128 judul dengan jumlah total 51.901.745 penonton. Jumlah tersebut, menunjukkan pertumbuhan penonton sebesar 1,38% dari perolehan 51.192.832 penonton di 2018. Angka pertumbuhan tersebut berada di bawah pertumbuhan jumlah layar (15,68%). Sementara, pertumbuhan penonton di 2018 sebesar 20,77% disandingkan dengan pertumbuhan layar di tahun yang sama sebesar 17,83% .

Penghitungan jumlah penonton ini mencakup film-film yang beredar di bioskop berjaringan dan independen (tidak termasuk pemutaran terbatas dan pemutaran keliling/roadshow di luar gedung bioskop). Penghitungan akumulasi jumlah penonton per tahun tidak memasukkan data penonton film yang ditayangkan ulang di bioskop jauh setelah siklus penayangan pertama (*second run*).

Jumlah Judul Film	2017	2018	2019	2020
Penonton di atas 1 juta	11	14	15	3
Penonton 100 ribu s/d 1 juta	44	61	58	13
Penonton di bawah 100 ribu	57	53	55	19

Tabel 1. Jumlah penonton film per judul tahun 2017-2020 dibagi menurut akumulasi jumlah penonton

Pada tahun 2019 ada 15 judul film beredar dengan penonton berjumlah di atas satu juta atau sebanyak 57% dari total seluruh jumlah penonton.

2 Periode perhitungan data film yang ditayangkan di bioskop dalam periode 01 Januari – 31 Desember 2019.

Sepanjang tahun 2019, terdapat penambahan 78 bioskop dengan 286 layar dari 5 bioskop berjaringan dan juga bioskop independen. Penambahan terjadi di 43 kota di 19 provinsi. 37 bioskop berada di ibukota provinsi, dan 41 bioskop berada di kota dengan status kota/kabupaten. Pada akhir Desember 2019, terdapat 508 bioskop dengan 2.110 layar.

Persebaran	2019		2020	
	Bioskop	Layar	Bioskop	Layar
Sumatera & Kepri	21 (27%)	78 (27%)	1 (7%)	4 (7%)
Jawa	48 (62%)	177 (62%)	11 (79%)	50 (83%)
Kalimantan	2 (3%)	7 (2%)	1 (7%)	2 (3%)
Sulawesi	2 (3%)	8 (3%)	0	0
Bali, NTB, dan Maluku	4 (5%)	16 (6%)	0	0
Papua			1 (7%)	4 (7%)

Tabel 2. Jumlah bioskop dan layar di Indonesia tahun 2019 & 2020 dibagi menurut lokasi

Presentasi data filmindonesia.or.id (FI) pada 2019³ juga membahas pertumbuhan jumlah pekerja film Indonesia yang ikut meningkat secara signifikan. Jumlah orang yang bekerja di industri film dapat diasumsikan terus meningkat setiap tahun. Basis data pekerja film di FI yang sementara ini hanya dapat mencatat para pekerja yang namanya tercantum pada kredit utama film sebagai kru kreatif (misalnya produser, sutradara, penulis, penata kamera dan lain-lain) pun menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Secara keseluruhan, sejak tahun 1998 sampai dengan 2017, jumlah orang yang terlibat sebagai pekerja film di dalam basis data FI mencapai 23 ribu orang, belum mencakup kru non-kreatif yang biasanya adalah pekerja harian yang bertugas mendukung tim teknis, para asisten pekerja, pengemudi atau penyedia makanan dan minuman.

FI mencatat satu hal yang mengkhawatirkan bahwa di kalangan pekerja kreatif, kenaikan jumlah pekerja film ini dibayangi dengan tingginya tingkat *turnover* pekerja film. Hampir sebagian besar pekerja yang baru terlibat di dalam produksi film tidak meneruskan karirnya di sektor ini. Tingginya angka *turnover* pekerja merupakan tanda bahwa kerja di industri film tidak bisa diandalkan oleh seorang pekerja untuk bertahan, baik dari perspektif ekonomi atau kesejahteraan maupun dari perspektif akumulasi pengetahuan dan pengalaman kerja.

3 Pemandangan Umum Industri Film Indonesia 2019, filmindonesia.or.id dan Badan Ekonomi Kreatif RI, 2019, filmindonesia.or.id.

2. Dampak Ekonomi-Sosial Pandemi dan Tindakan Solidaritas bagi Pekerja Film

Persoalan *sustainability* pekerjaan di dalam industri film yang sudah diidentifikasi FI dalam laporan 2019 menjadi lebih menonjol dalam kondisi pandemi Covid-19. Terhentinya produksi film di masa Pandemi COVID-19 membuat ratusan hingga ribuan pekerja film di Indonesia kehilangan penghasilan, terutama para pekerja harian. Produser Chand Parwez Servia membuat perkiraan bahwa jumlah pekerja yang terlibat dalam produksi film saat ini setidaknya berjumlah 35 ribu orang⁴, sementara nama kru kreatif terdaftar di dalam basis data FI berjumlah 23 ribu⁵. Selain terhentinya produksi sejak akhir Maret 2020, mulai akhir April 2020 bulan Ramadhan dimulai dan Idul Fitri tiba pada akhir Mei 2020. Kru film yang tidak punya penghasilan harus menghadapi kemungkinan kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri.

Keadaan ini membangkitkan solidaritas di antara pekerja film untuk menggalang bantuan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Dari banyak inisiatif yang dijalankan pada masa pandemi 2020, FI mendapatkan akses informasi dari dua di antaranya, yaitu: Solidaritas Sinema dan Paguyuban Filmmaker Jogjakarta (PFJ)⁶. Dua inisiatif ini berbeda latar pembentukannya, akan tetapi memiliki fokus pada kegiatan memberi dukungan atau kerja solidaritas kepada pekerja film. PFJ merupakan wadah pertemuan pekerja film yang berbasis di Yogyakarta sejak 2013, aktif melakukan kegiatan kerjasama untuk pemutaran film atau pelatihan, juga penggalangan dana untuk korban bencana. Sementara Solidaritas Sinema dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap berhentinya kegiatan produksi akibat pandemi pada tahun 2020.

4 Reporter Tempo, 'Chand Parwez Servia: Platform Digital Belum Bisa Gantikan Bioskop', Koran Tempo, 19 September 2020.

5 Data terkumpul dari kredit pekerja film antara tahun 1998-2017. Pemandangan Umum Industri Film Indonesia 2019, filmindonesia.or.id dan Badan Ekonomi Kreatif RI, 2019, filmindonesia.or.id, h. 16.

6 Contoh inisiatif lain yang berjalan di sektor industri film adalah Gerakan APROFI Peduli yang dilakukan oleh asosiasi produser pada akhir April 2020. Inisiatif ini mengumpulkan donasi melalui platform Kitabisa.com yang jumlahnya mencapai 80,6 juta rupiah. Dana ini dibagi menjadi bantuan tunai sebesar 800 ribu rupiah kepada 100 pekerja film harian seperti runner, pengemudi dan pembantu umum.

PFJ mendapatkan bantuan dari Pakualaman dan konser amal Didi Kempot berupa bahan makanan pokok untuk para seniman di Yogyakarta. Selain itu, PFJ juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta untuk mendapatkan dana produksi film dengan melibatkan 10 sutradara yang memiliki KTP Yogyakarta untuk membuat film dengan biaya sebesar 10 juta rupiah tiap film.⁷ Dana yang diperoleh tidak seluruhnya dihabiskan untuk biaya produksi, melainkan disisihkan sebagian untuk memberikan dana bantuan kepada pekerja film Yogya sebesar Rp 300.000 per orang.

Sementara itu, cara kerja yang sedikit berbeda dilakukan oleh Solidaritas Sinema dalam bentuk menggalang dana dari para aktor, asosiasi pekerja film dan organisasi lainnya.⁸ Mereka juga melakukan pengumpulan dana publik (*crowdfunding*) dengan mekanisme transfer tunai atau penjualan t-shirt. Total dana yang terkumpul melalui inisiatif ini mencapai Rp 74.773.000 dan kemudian disalurkan kepada 580 kru film dalam bentuk beras dan minyak senilai 150 ribu rupiah untuk tiap penerima.

Mekanisme kerja Solidaritas Sinema dimulai dari proses pendataan calon penerima mengingat ketiadaan data dan profil pekerja film di Indonesia yang dapat menjadi acuan verifikasi di dalam memberikan bantuan. Pada awalnya, Solidaritas Sinema melakukan pendataan pekerja film yang membutuhkan melalui Google Form. Namun, dalam waktu singkat, jumlah pekerja film yang mengajukan permintaan bantuan hampir mencapai 3 ribu orang dalam waktu tiga hari. Verifikasi pun dilakukan manual dengan mengecek produksi film terakhir dan diverifikasi oleh *line producer* sebagai kru yang paling banyak berhubungan dengan pekerja lepas. Cara ini dianggap cukup efektif untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut benar terlibat di dalam produksi film.

7 Agni Tirta, Ketua Paguyuban Filmmaker Jogjakarta. Diwawancarai secara daring oleh Raditya Mahendra Putra pada 29 November 2020.

8 Prima Rusdi dan Alderina, Solidaritas Sinema. Diwawancarai secara daring oleh Klara Virencia pada 29 November 2020.

Selama pendataan ini, tim pelaksana Solidaritas Sinema juga menemukan bahwa pekerja yang membutuhkan ternyata jauh lebih variatif dibandingkan perkiraan sebelumnya. “Setelah data masuk, ini kejutan buat kita semua, tadinya yang kita pikir terbatas—yang kita pikir yang paling perlu dibantu adalah kawan-kawan *driver*, OB, yang harian. Ternyata lebih variatif daripada itu. *Telco*, *stunt coordinator*, *assistant make-up*, pencatat adegan. Aku cukup syok sebenarnya. Ini pemahaman baru lho buat banyak orang. Karena selama ini kita ketemu di lapangan kita nggak pernah ngomongin hal-hal seperti ini,” kata Prima Rusdi.⁹ Mekanisme pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan Solidaritas Sinema memungkinkan adanya perluasan atau keragaman subjek penerima bantuan karena tidak hanya didasarkan pada asumsi siapa yang membutuhkan atau hanya memberi kepada yang kenal dekat saja.

Sayangnya, pendataan yang dapat diandalkan mengenai jumlah pekerja film harian ini tidak ada sehingga tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah dan profil pekerja film yang kehilangan sumber pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Inisiatif-inisiatif pemberian bantuan seperti ini memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan verifikasi agar tujuannya mencapai sasaran yang tepat dan tidak hanya menebar bantuan dengan tujuan kita-kira berdasarkan estimasi atau statistik general. Ketersediaan data pekerja harian sudah saatnya menjadi prioritas untuk menciptakan gambaran lebih lengkap mengenai pekerja di industri ini dan ketika menghadapi situasi-situasi krisis seperti tahun 2020, upaya mitigasi dan bantuan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

9 Prima Rusdi (penulis skrip) dan Alderina (*publicist film*), Solidaritas Sinema. Diwawancarai secara daring oleh Klara Virencia pada 29 November 2020.

3. Pandemi Covid-19 dan Produksi Film Indonesia

Pukulan Covid-19 terhadap perfilman Indonesia datang lebih awal sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi menanggapi pandemi Covid-19 pada 13 April 2020.¹⁰ Sementara pengambil kebijakan tarik-ulur pada bulan Maret, sejumlah produser film Indonesia tak bisa mengelak dari bayang-bayang kerugian finansial dan merancang ulang skenario produksi film dalam beradaptasi dengan perkembangan situasi bencana kesehatan. Hingga akhir Maret 2020, jadwal penayangan sepuluh judul film ditunda, yaitu: *KKN di Desa Penari*, *Tersanjung The Movie*, *Jodohku Ke Mana?*, *Roh Mati Paksa*, *Djoerig Salawe*, *Malik & Elsa*, *Tarung Sarung*, *Serigala Langit*, *Generasi 90-an: Melankolia*, dan *Bucin*.

Skala kerugian finansial produser film tidak sama rata. Selain anggaran produksi yang telah ditetapkan sejak awal di tiap proyek, dampak ekonomi-sosial dari pandemi Covid-19 berbeda seturut dengan tahapan produksi pada masing-masing film. Produser film *Bucin*, Sunil Samtani, mengatakan biaya pemasaran sudah dikeluarkan walau proses pengambilan gambar belum rampung. Biaya tersebut mencakup belanja iklan di media dan berbagai medium, termasuk papan reklame di jalan-jalan besar dan kegiatan promosi keliling di berbagai kota.¹¹ Rocky Soraya, produser dan sutradara film *The Doll 3* menyebut kerugian dari penundaan pengambilan gambar film ini mencapai angka 1 miliar rupiah.¹²

10 Pemerintah Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 13 Maret 2020 sebagai tanggapan terhadap pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020, lalu secara resmi mendeklarasikan Indonesia dalam status darurat kesehatan pada 31 Maret 2020. Kemudian pandemi Covid-19 baru ditetapkan secara resmi sebagai bencana non-alam pada 13 April 2020.

11 Cicilia, Maria 2020, 'Corona dan tantangan film Indonesia', *Antaraneews.com*, 27 Maret 2020.

12 Amarilisya, Alifitya 2020, 'Ada yang rugi biaya produksi sampai Rp 1 miliar', *Brilio.net*, 20 Maret 2020.

Simpang siur kebijakan pemerintah berbuntut panjang. Sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan pada 2 Maret, pemerintah Indonesia gagap dan tidak satu suara dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah yang sistematis untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang diterbitkan di akhir Maret, tidak mewajibkan pemerintah lokal untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak hanya gagal memberi acuan yang mengatur interaksi dan mobilisasi orang di ruang publik dan di berbagai jenis kegiatan yang melibatkan kerumunan orang, seperti produksi film, peraturan tersebut justru membatasi kewenangan pemerintah lokal karena PSBB hanya bisa diterapkan dengan persetujuan Kementerian Kesehatan. Pada awal April, hanya dua permintaan pemerintah provinsi terkait PSBB yang dikabulkan, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat. Beberapa permintaan dari pemerintah kota/kabupaten ditolak, termasuk Rote Ndao (NTT), Sorong (Papua Barat), Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), dan Gorontalo. Bahkan ada satu provinsi di Indonesia, yang kerap dipandang sebagai lokus seni-budaya, yang bersikeras menolak PSBB, yakni DI Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Gubernur, Yogyakarta cukup menetapkan Status Tanggap Darurat demi menghindari kepanikan warga.¹³

Di kalangan pegiat seni-budaya, termasuk di sektor film, himbuan Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Hilmar Farid, menjadi tanda bahaya. Pada 24 Maret 2020, lima belas stasiun televisi nasional dihimbau menghentikan syuting dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Walau ada pertanda yang relatif lebih solid dari pihak pemerintah, yaitu surat himbuan tersebut, produksi film tidak dapat secara instan diberhentikan. "Syuting film yang sedang berjalan ada di posisi sulit. Bila dihentikan, ada efek ke biaya. Berhenti di tengah syuting bisa dibilang nanggung... Ada dua film dari anggota APROFI yang kemudian memilih untuk menghentikan kegiatan syuting. Satu di Yogyakarta, satu di Rembang," ujar Edwin Nazir, ketua umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI).¹⁴

Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang tidak terkoordinasi, lamban dan gagal dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada publik menambah beban. "Dengan informasi yang simpang siur, semua menjadi agak serba salah dan bingung mau mengambil langkah apa. Saat bioskop diminta tidak beroperasi dulu, kegiatan produksi relatif terhenti," lanjut Edwin.¹⁵ Titik balik produksi film dimungkinkan oleh Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2 Juli 2020. Keputusan tersebut mencakup protokol dan panduan teknis mengenai produksi audiovisual. "Setelah terbit surat keputusan itu, kegiatan syuting diperbolehkan kembali," cerita Edwin.

13 Subarkah, Lugas, 'Sultan Jogja: DIY tak akan terapkan PSBB karena bisa menakut-nakuti masyarakat', *Harianjogja.com*, 2 Oktober 2020.

14 Edwin Nazir, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI). Diwawancarai secara daring oleh Klara Virencia pada 28 November 2020.

15 Idem

Di bawah kampanye 'New Normal' pemerintah, ada peluang untuk pemulihan atau lebih tepat, percepatan roda-roda ekonomi kembali bergerak, termasuk di industri perfilman. Namun, ada sejumlah konsekuensi yang perlu ditanggung sendiri oleh pelaku industri. Dalam konteks produksi film, biaya protokol kesehatan untuk memastikan para individu yang terlibat di dalam tiap kegiatan syuting aman membuat anggaran produksi naik hingga 10 persen. Bila sebuah film semula diperkirakan membutuhkan dana produksi sebesar 5 miliar rupiah, maka biaya tambahan untuk perlindungan kesehatan para kru dan pemain bisa mencapai setengah miliar - sepuluh persen dari anggaran.

Pada level praktis, birokratisasi dalam respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19 tidak hanya membuat biaya produksi membengkak. Rencana produksi versi adaptasi 'New Normal' perlu melibatkan koordinasi multi-pihak antara pejabat daerah lokal, kepolisian dan tim produksi. Salah satu contoh konkrit dari kerumitan teknis dan birokratis dalam memproduksi film di masa pandemi datang dari Meiske Taurisia, produser film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. Pra-produksi film ini dimulai sejak September tahun lalu. Dengan lokasi syuting di Rembang, produksi film melibatkan sekitar 150 orang kru pekerja, termasuk kru internasional, yakni dari Jepang dan New York. Pengambilan gambar pertama dilakukan pada 24 Februari. "Perihal Covid masih sekadar 'dengar-dengar';" cerita Meiske.¹⁶

Bila menelusuri respons awal pemerintah Indonesia, memang benar bahwa Covid-19 belum dilihat sebagai ancaman serius oleh mayoritas institusi pemerintah. Hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang serius dan seksama mengambil langkah preventif atas ancaman penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan mendeklarasikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana pada 28 Januari. Pada 29 Februari, BNPB meminta perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

16 Meiske Taurisia, Produser Palari Films, Jakarta. Diwawancarai secara daring oleh Klara Virencia pada 30 November 2020.

Terlepas dari keheningan para pejabat pemerintah, tim produksi yang dipimpin Meiske telah berkoordinasi dengan Bupati dan kepolisian sejak awal Februari. Sepanjang proses pengambilan gambar di bulan tersebut, tim produksi terus berkoordinasi dengan pemerintah lokal dan segera menyusun protokol kesehatan, termasuk penyediaan alat perlindungan diri standar, cek suhu badan, pemeriksaan kondisi kesehatan kru oleh dokter dari fasilitas kesehatan setempat. Kegiatan syuting yang semula dijadwalkan selesai dalam kurun waktu empat minggu (Februari-Maret) terpaksa dipindah ke bulan Juli-Agustus. Pada periode tersebut, tim produksi secara ketat menerapkan protokol kesehatan, termasuk karantina dua minggu sebelum dan setelah syuting dan tes PCR, dan memastikan asuransi yang diberikan kru sejak awal tetap berlaku hingga proses syuting kedua selesai. Bahkan premi asuransi bagi kru ditingkatkan.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap di ranah produksi film nampak jelas. Ada ongkos ekstra untuk memastikan kesehatan dan keamanan pekerja, serta ada dampak psikososial yang dialami para pekerja karena kehilangan interaksi langsung dalam kerja produksi sebagai tim. Dari sisi perencanaan waktu produksi pun, kebutuhan karantina pra dan pasca produksi mengakibatkan masa kerja yang lebih panjang. Bagi pekerja film yang hidup dari proyek ke proyek, perpanjangan waktu kerja untuk karantina membuat jumlah proyek yang bisa dikerjakan menjadi lebih sedikit. Sementara bagi produser atau investor film, walaupun barangkali jumlah honorarium pekerja tidak meningkat, perpanjangan waktu berarti tambahan biaya logistik dan akomodasi yang diperlukan untuk mengumpulkan pekerja di lokasi. Produser Chand Parwez Servia memperkirakan tambahan biaya ini mencapai 20 persen, sementara biaya pemeriksaan dan fasilitas penunjang protokol kesehatan kira-kira 10 persen - artinya biaya pembuatan film selama pandemi lebih mahal 30 persen dari sebelumnya.¹⁷

17 Reporter Tempo, 'Chand Parwez Servia: Platform Digital Belum Bisa Gantikan Bioskop', Koran Tempo, 19 September 2020

4. Pertumbuhan Bioskop dan Layar Di Tengah Pandemi

Sepanjang 2020, jumlah layar dan bioskop menunjukkan adanya pertumbuhan. Bagian ini merupakan analisis terhadap dinamika moda eksibisi film yang bersumber dari data-data yang dikumpulkan oleh FI.

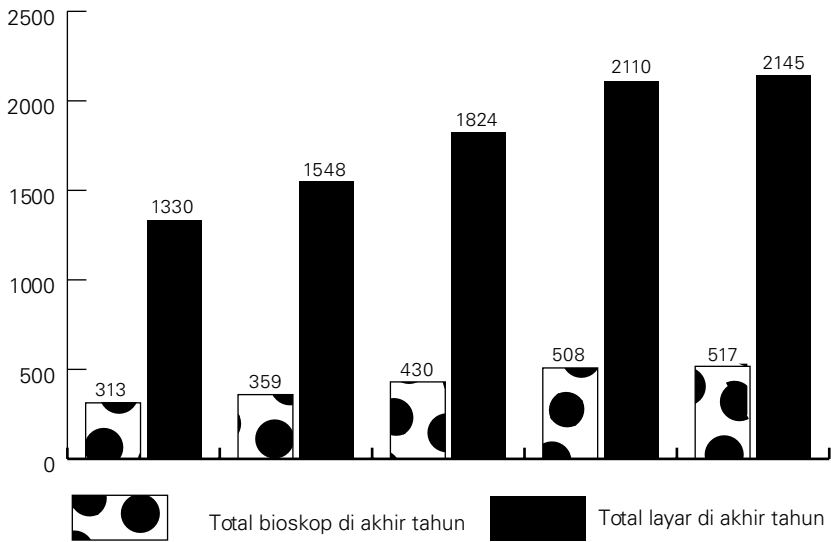
Laju pertumbuhan yang bahkan sudah dimulai di Januari 2020, tampaknya terpaksa terhenti karena pandemi. Pada akhir tahun 2018, Indonesia hanya memiliki 430 bioskop dengan 1.824 layar. Pada akhir Oktober 2020, terdapat 517 bioskop dengan 2.145 layar yang terpantau masih berstatus aktif (walau mayoritas masih belum beroperasi karena pandemi).

Sebelum adanya penutupan bioskop, sepanjang Januari – Maret 2020, terdapat 8 bioskop baru dengan 35 layar. Pasca pemberlakuan prosedur protokol kesehatan seiring pembukaan kembali bioskop, terdapat 2 bioskop baru sepanjang Oktober 2020 dengan tambahan 8 layar. Pengoperasian bioskop masih mengikuti perkembangan pandemi, sehingga belum beroperasi penuh sesuai kapasitas layar.

Pertumbuhan bioskop sebelum pandemi mencerminkan optimisme industri film menanggapi antusiasme penonton film Indonesia yang ditunjukkan dalam laporan Pemandangan Umum Industri Film 2019¹⁸ serta hasil survei Saiful Mujani Research Center yang dipresentasikan pada Januari 2020¹⁹. Dari 8 bioskop baru dalam tiga bulan tersebut dilakukan oleh bioskop berjaringan seperti Cinema 21, CGV, dan Cinapolis, serta jaringan bioskop baru, Kota Cinema Mall (KCM). Hingga akhir Oktober pertambahan menjadi 10 bioskop dengan 39 layar. Adapun bioskop baru tersebut mayoritas masih berada di Jawa (6 bioskop), dan dari 4 bioskop sisanya, 3 bioskop merupakan bioskop satu-satunya di kota tersebut Kota Dumai (Prov. Riau), Kabupaten Pamekasan (Madura, Prov. Jawa Timur), dan Kota Sorong (Prov. Papua Barat). Sementara, tiga kota tersebut, terdapat satu bioskop baru di Kota Banjarmasin yang sudah terdapat dua bioskop lain sebelumnya.

18 Pemandangan Umum Industri Film Indonesia 2019, filmindonesia.or.id dan Badan Ekonomi Kreatif RI, 2019, filmindonesia.or.id.

19 Armando, Ade, 'Kebangkitan Film Indonesia', saifulmujani.com, 6 Februari 2020.



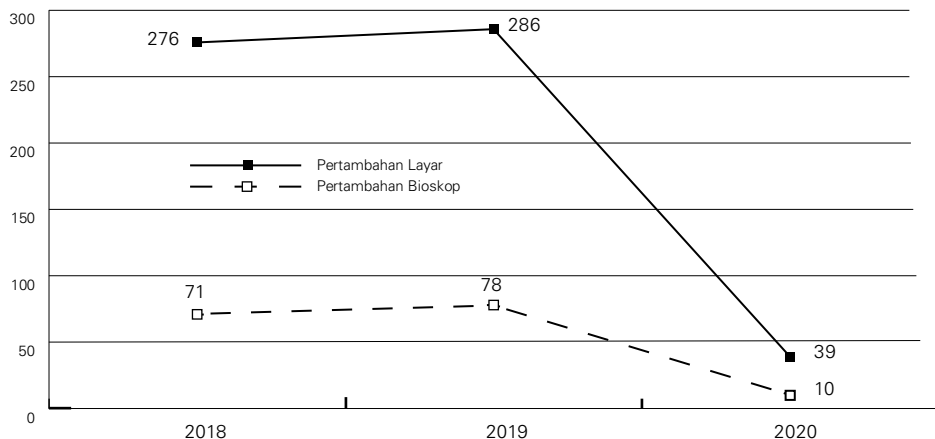
Grafik 1. Jumlah total bioskop dan layar 2016 – 2020

Sementara penambahan bioskop dalam tahun 2020 berdasarkan jaringannya tercatat sebagai berikut:

Jaringan Bioskop	Bioskop Baru	Bioskop baru di kota baru
Cinema 21	3	2
KCM	3	1
CGVblitz	2	0
Cinemaxx	2	0

Tabel 3. Jumlah bioskop baru pada tahun 2020 menurut jaringan

Penambahan tersebut di atas sangat jauh menurun kalau dilihat dalam konteks pertumbuhan bioskop dan layar dalam tiga tahun terakhir sejak 2018.



Grafik 2. *Pertambahan jumlah bioskop dan layar di Indonesia tahun 2018 – 2020*

Sejak tahun 2017, jumlah penonton film Indonesia di bioskop berkisar antara 3,5 sampai 4,3 juta setiap bulan. Penutupan bioskop selama 7 bulan berarti industri ini kehilangan potensi penghasilan dari sekitar 30 juta penonton.

Meskipun penyebaran dampak pandemi tidak sama rata di tiap wilayah Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya menurut data FI tahun 2019, sebesar 62 persen dari seluruh layar bioskop berada di Jawa, pulau yang menghadapi dampak pandemi paling parah. Kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar pun dihasilkan di pulau ini, karena itu tidak ada perbedaan signifikan pada buka atau tutupnya bioskop di pulau-pulau luar Jawa.

Memasuki pertengahan tahun, kebijakan pembatasan sosial diperlunak. Bioskop sempat akan buka kembali pada 29 Juli, akan tetapi batal setelah mempertimbangkan laju peningkatan infeksi yang tidak menurun seperti harapan. Setiap minggu, jika melihat data tahun 2019, ada antara 3 sampai 5 judul film Indonesia yang diluncurkan di bioskop. Penutupan bioskop selama 7 bulan berarti hilangnya paling tidak 60 persen jam tayang dalam setahun. Belum ada perhitungan rinci yang dinyatakan secara resmi dari asosiasi produser film Indonesia mengenai berapa judul film yang tidak bisa ditayangkan ke bioskop hingga pertengahan Oktober 2020.

Setelah menunggu tiga bulan, mulai pertengahan Oktober bioskop dapat dibuka kembali secara berangsur-angsur. Pada 12 Oktober, provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel yaitu PSBB transisi yang memungkinkan bioskop dapat menerima penonton dengan kapasitas 25 persen. Lalu pada 27 Oktober, peraturan dilonggarkan lebih jauh dan bioskop diperbolehkan menerima penonton hingga 50 persen kapasitas maksimal ruangan.

Pembukaan kembali bioskop ini sudah melalui perumusan protokol kesehatan. Sejak Juli 2020, pemerintah dan pengusaha bioskop sudah melakukan simulasi aturan baru berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Selama tidak bisa menerima penonton, bioskop seperti Cinema XXI misalnya, mencoba mempertahankan aliran pendapatan dari penjualan makanan dan minuman dengan layanan pesan antar menggunakan modifikasi dari aplikasi penjualan tiket²⁰. Secara resmi perusahaan ini tidak memberi pernyataan mengenai kebijakan pengelolaan pegawai selama bioskop harus ditutup.

20 Dewinta Hutagaol, Head of Corporate Communications & Brand Management, Cinema XXI. Jawaban wawancara diberikan secara tertulis kepada Levriana Yustriani pada 4 Desember 2020.

Jumlah pekerja di sektor eksibisi film ini bisa diperkirakan dari informasi yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan di platform jaringan profesional seperti LinkedIn walaupun harus ditimbang bahwa data ini tidak diperbarui secara rutin sehingga tidak bisa sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang mutakhir. Cinema XXI, jaringan bioskop dengan layar terbanyak di Indonesia yang dikelola PT Nusantara Sejahtera Raya menyatakan jumlah pekerjanya melebihi 10 ribu, sementara Cinapolis Indonesia yang dikelola PT Cinemaxx Global Pasifik mencantumkan jumlah pekerja pada kisaran 500 sampai 1000.²¹ Jaringan CJ-CGV ketika diwawancarai untuk laporan ini menyebutkan jumlah pekerja 1.800 orang.²² Menurut data FI, ketiga jaringan ini merepresentasikan 84 persen jumlah bioskop di Indonesia. Kalau dibuat perkiraan dari data tiga jaringan yang tersedia, jumlah pekerja sektor eksibisi bioskop dapat mencapai 15 ribu.

Manael Sudarman menyatakan bahwa pengelola CJ-CGV menempuh beberapa cara untuk menekan biaya operasional, antara lain mengurangi gaji pekerja antara 10 sampai 50 persen, meminimalisir keterlibatan karyawan harian, sampai menawar pembayaran sewa gedung. Selain siasat penghematan, perusahaan ini juga berusaha menjaga aliran pendapatan dari sektor non-eksibisi seperti membuat video iklan.

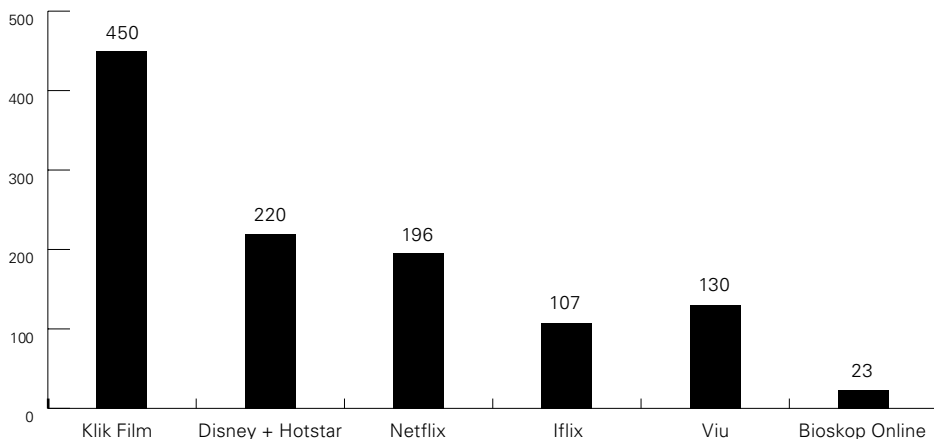
Ketika bioskop berangsur-angsur mulai dibuka kembali dengan kapasitas 25% lalu kemudian 50%, pertanyaan mendasar bagi para pengusaha adalah apakah mereka bisa memulihkan aliran pendapatannya setelah vakum selama 7 bulan? Di satu sisi ada kebutuhan menghidupkan kembali unit ekonomi ini, di sisi yang lain, ramai-tidaknya bioskop amat sangat tergantung dari film yang diputar dan kemampuannya untuk menarik penonton. Bioskop membuka kembali pintunya dengan hati-hati karena harus berhitung apakah biaya yang dikeluarkan bisa diimbangi dengan pemasukan kalau tak punya film box office yang sanggup mengajak penonton melupakan keraguan atau kecemasan mereka akan wabah Covid-19.

21 Laman PT Nusantara Sejahtera Raya <https://id.linkedin.com/company/nsr-cinemaxxi>.

22 Manael Sudarman, Head of Sales and Marketing CJ CGV Cinema. Diwawancarai secara daring oleh Levriana Yustriani pada 30 November 2020.

5. Layanan Platform Daring di masa Pandemi: Peluang Baru atau Peralihan Sementara?

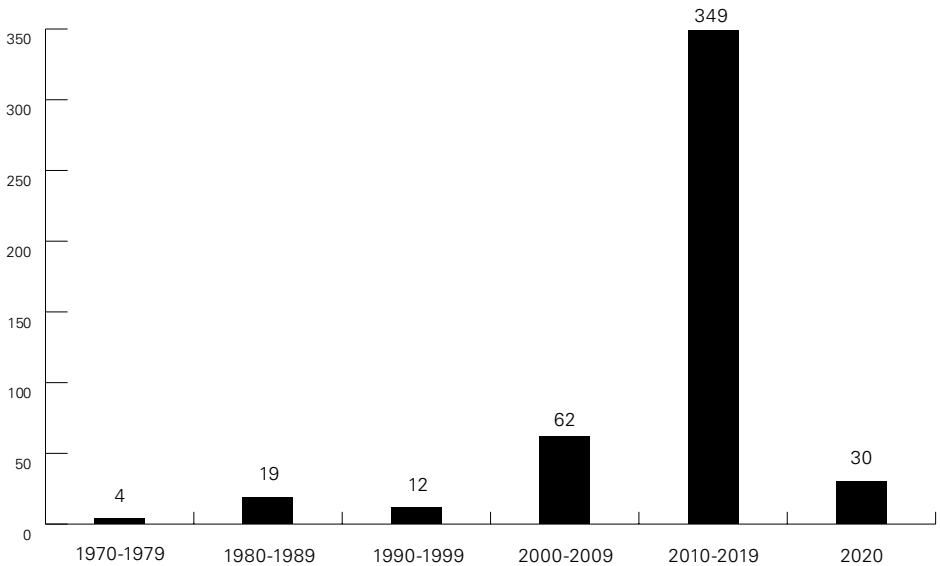
Masa pandemi yang datang tiba-tiba membuat bioskop terpaksa ditutup dan melambat perkembangannya. Seiring aktivitas luar rumah dihentikan di banyak kota, menonton film di bioskop berpindah ke moda menonton melalui platform daring (online). Karena itu, moda-moda eksibisi film non-bioskop mengalami pertumbuhan yang lebih subur. Sebelum pandemi, terdapat platform menonton daring yang menyediakan film Indonesia di katalognya, seperti Netflix, Hooq, Iflix, Viu, dan terakhir Klikfilm. Pada perkembangan sepanjang pandemi, Hooq menutup layanannya dan juga operasional perusahaannya per 30 April 2020. Namun, selain berhentinya Hooq, terdapat dua platform daring baru. Bioskop Online mulai beroperasi bulan Juli 2020, sementara bulan September 2020, platform daring Disney+ Hotstar merilis aplikasi di Indonesia dan menyediakan film-film Indonesia dalam katalognya.



Grafik 3. Jumlah judul film Indonesia di platform menonton daring tahun 2020

Tidak banyak informasi tentang berapa banyak judul film Indonesia yang beredar di platform online. Namun, dari platform online Netflix, Iflix, Viu, Disney+ Hotstar, dan Bioskop Online terdapat 476 judul film yang beredar dengan 134 judul yang muncul di lebih dari satu platform. Sementara, Klikfilm menjadi platform dengan repositori atau katalog dengan jumlah film Indonesia terbanyak.

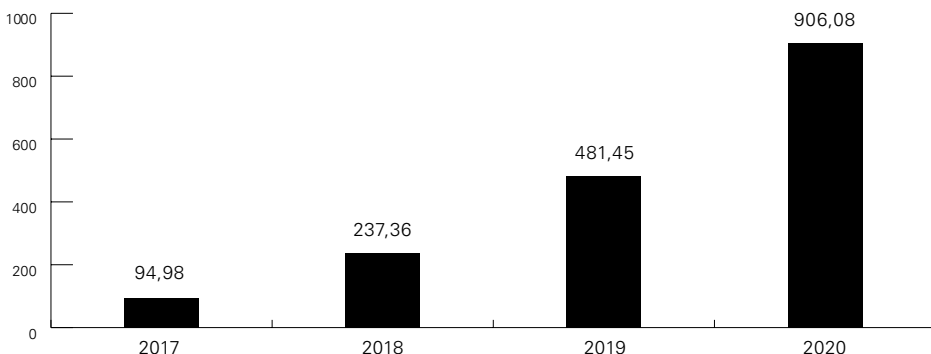
Lima platform daring (Disney+ Hotstar, Netflix, Iflix, Viu, dan Bioskop Online) menyediakan film dari tahun rilis yang sangat beragam. Walau mayoritas merupakan film-film yang dirilis pada tahun 2000 atau setelahnya, juga terdapat film-film dari era 1970an, 1980an, dan 1990an.



Grafik 4. Jumlah judul film Indonesia di katalog platform menonton daring tahun 2020 menurut dekade produksi

Kebiasaan menonton film Indonesia di platform daring yang berkembang di masa pandemi, bukan sekadar dilihat sebagai bentuk bertahan hidup tapi dapat dilihat juga sebagai paksaan untuk melihat film sebagai kekayaan intelektual (*intellectual property/IP*) yang memiliki ruang hidup yang panjang. Kunci pengembangan industri bukan lagi pada ruang produksi tetapi distribusi bertumpu pada pemanfaatan film (salah satunya) sebagai produk IP. Konsekuensinya, bukan saja desain produksi memperhatikan keluasaan dimensi peluang distribusi, melainkan juga banyak aspek lain yang membuat setiap film memiliki kemungkinan jangka hidup yang panjang. Salah satunya adalah pemeliharaan materi film pasca periode peredaran bioskop (*theatrical release*) serta pendidikan apresiasi dan kuratorial film.

Studi dan data memang menunjukkan adanya perubahan perilaku menonton masyarakat di masa pandemi COVID-19. Studi yang dilakukan Media Partners Asia menemukan konsumsi mingguan video daring telah meningkat lebih dari 60 persen di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Tren ini juga tercermin dari peningkatan jumlah pengguna Netflix di Indonesia yang meningkat secara signifikan pada tahun 2020, dengan estimasi total lebih dari 906.000 pelanggan di Indonesia. Peningkatan ini juga sejalan dengan dibukanya blokir Netflix oleh pihak Telkom setelah empat tahun melakukan negosiasi.²³



Grafik 5. Perkiraan Jumlah Pelanggan Aktif Netflix Indonesia 2017-2020 (Sumber: statista.com)

Pemerintah Indonesia berusaha mendorong masyarakat Indonesia mengakses film secara legal. Hal yang diupayakan adalah pemblokiran situs-situs yang menyajikan tontonan ilegal di internet. Meskipun masyarakat masih dapat menemukan alamat pengganti melalui platform media sosial, namun upaya ini mulai menunjukkan hasil. Studi yang dilakukan YouGov bekerja sama dengan AVIA Coalition Against Piracy (CAP) menunjukkan penurunan hingga 55 persen terhadap konsumsi konten *streaming* ilegal dalam rentang Agustus 2019 hingga Juni 2020²⁴. Sekitar 50 persen responden di Indonesia mengatakan penurunan itu terjadi karena mereka saat ini tidak lagi memiliki akses terhadap layanan situs ilegal.

23 Winarto, Yudho 2020, 'Indonesia's Telkom Group unblocks Netflix as it amps digital push', english.kontan.co.id, 7 Juli 2020.

24 Asia Video Industry Association, CAP Indonesia Piracy Report (2020), <https://avia.org/cap-indonesia-piracy-report/>.

Perubahan perilaku menonton ini mendorong munculnya platform-platform lokal untuk memberikan layanan streaming film Indonesia. Salah satunya adalah Bioskop Online yang hadir di bulan Agustus 2020. Layanan ini hadir dengan tujuan dapat memicu industri film agar terus bergerak. "Waktu (pandemi) itu kemudian kita berpikir, apa yang kita sebagai pelaku industri bisa lakukan untuk terus menstimulus ekosistem supaya dapat tetap berkarya kemudian, menstimulus masyarakat juga gitu. Dan sehingga perekonomiannya di industri ini tetap bergerak. Akhirnya kita dirikanlah Bioskop Online," kata Ajeng Prameswari dari Bioskop Online.²⁵

Berbeda dengan layanan streaming yang ada di Indonesia yang memilih model bisnis SVOD (Subscription Video on Demand) atau model berlangganan, Bioskop Online memilih model bisnis dengan TVOD (Transactional Video on Demand). Layanan ini memungkinkan pengguna membayar biaya tontonan per film yang ingin ditonton. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengguna untuk menonton satu film berkisar pada 5 sampai 10 ribu rupiah. Biaya ini jauh lebih murah dari harga tiket menonton di bioskop yang rata-rata berkisar antara 35 sampai 50 ribu rupiah untuk sekali menonton.

Peminat OTT yang diselenggarakan oleh penyedia lokal memang tampak menjanjikan. Dalam waktu empat bulan setelah peluncuran platform bioskop online, pelanggan yang teregistrasi mencapai 450 ribu pengguna, atau rata-rata bertambah 112.500 pengguna tiap bulan. Platform OTT lainnya seperti Klik Film juga menunjukkan angka peminat yang tinggi. Dengan menyuguhkan film Indonesia dan film impor, aplikasi yang dikembangkan oleh Falcon Pictures ini mengklaim mendapatkan 15 juta penonton selama bulan Maret 2020²⁶. Namun, seperti halnya data penonton film, data-data perolehan penonton platform digital di atas masih merupakan klaim penyedia layanan karena belum ada institusi yang menghimpun jumlah penonton atau pengguna platform OTT.

25 Ajeng Prameswari, Direktur Bisnis Digital Bioskop Online. Diwawancarai secara daring oleh Deden Ramadani dan Levriana Yustriani pada 4 Desember 2020.

26 Kintoko, Irwan Wahyu 2020, 'Ada Pandemi Virus Corona, Jumlah Penonton Film di Aplikasi Klik Film Tercatat Lebih 15 Juta Orang', wartakotalive.com, 8 April 2020

Di balik angka-angka yang tinggi ini, muncul keraguan dari pembuat film terhadap platform OTT yang ada saat ini. Dikutip dari Kompas.id, Riri Riza meragukan model bisnis dengan harga “tiket” yang kurang dari seperempat harga tiket bioskop. “Ditonton lebih dari satu juta penonton di bioskop sudah untung. Untuk OTT, masih sulit dibayangkan,” katanya.²⁷

Pendapat ini masuk akal dengan perhitungan konvensional. Andai saja biaya produksi sebuah film hari ini berkisar dua miliar rupiah, maka dengan *share* harga tiket kepada produser sebesar Rp2.250,- (setelah dikurangi pajak sebesar 10 persen), maka untuk balik modal sebuah film memerlukan sekitar 880 ribu penonton di platform daring. Dengan rata-rata kenaikan jumlah pengakses bioskop online sebesar 112.500 per bulan, angka ini masih jauh dari balik modal.

Pihak bioskop online enggan menjelaskan bagaimana model bisnis dengan harga tersebut dapat berjalan. Terutama di dalam memberikan keuntungan bagi pembuat film maupun platform bioskop online itu sendiri. Namun, Ajeng, Direktur Bisnis Digital Bioskop Online, menyebutkan bahwa model bisnis yang ada sekarang ini patut dijalani. “Kita cukup sehat sih ya, tetapi misalnya kalau bicara sekarang tentunya harus banyak investasi yang dikeluarkan terutama untuk pengembangan platformnya. Tetapi secara bisnis modal cukup sehat,” katanya²⁸.

27 Radius, Dwi Bayu 2020, ‘Bergandeng Tangan demi Keberlanjutan’, kompas.id, 27 September 2020.

28 Ajeng Prameswari, Direktur Bisnis Digital Bioskop Online. Diwawancarai secara daring oleh Deden Ramadani dan Levriana Yustriani pada 4 Desember 2020.

Meskipun dari sudut pandang platform digital tampak sehat, namun jika melihat data penjualan film digital yang dipublikasikan PT MD Pictures Tbk pada semester I 2020, angkanya belum menggembirakan.²⁹ Pada semester I 2020, penjualan film digital nilainya 19,64 miliar rupiah, turun hingga 54,53% dibandingkan dengan semester I 2019 yang mencapai Rp 43,2 miliar. Padahal, pada semester I 2020, berbagai platform OTT mengklaim terjadi peningkatan penggunaan. GoPlay menyebutkan peningkatan engagement pengguna hingga 10 kali lipat di masa awal pandemi.³⁰ Platform Vidio juga menyebutkan bahwa aplikasinya sempat berada di posisi pertama di Google Play dan IOS pada bulan April 2020.³¹ Diduga, meskipun pengguna platform OTT meningkat signifikan, tetapi para penggunanya justru mengakses film impor, sehingga dampaknya kecil terhadap industri film Indonesia. Sayangnya, sulit memperkirakan kondisi ini mengingat masih minimnya perusahaan film yang *go-public* dan memiliki data-data terbuka yang dapat diakses.

Penjualan film secara digital ini juga belum mendapatkan dukungan dari pemerintah. Meskipun di satu sisi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong sineas dan masyarakat memanfaatkan layanan Video on Demand (VOD) sebagai lahan berkarya dan menikmati film.³² Namun, di sisi lain, pemerintah justru menarik pajak terhadap seluruh produk dan layanan digital tanpa pandang bulu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2020. Konsekuensinya, platform OTT lokal yang baru embrio juga sudah dikenakan pajak. Meskipun presentase pajak yang dikenakan lebih rendah dibandingkan pajak hiburan di bioskop, keringanan pajak sebetulnya dapat membantu industri yang sedang babak belur dihantam pandemi. Keringanan pajak bisa menjadi daya tarik bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia.³³

Dengan rendahnya dukungan pemerintah dan masih minimnya perusahaan film yang menjadi perusahaan terbuka atau publik, sulit menaksir apakah platform digital ini memberikan peluang di masa mendatang, atau hanya pengalih sementara.

29 Aldin, Ihya Ulum 2020, 'Bisnis Film Lesu, MD Pictures dan Bioskop CGV Merugi Ratusan Miliar', Katadata.co.id, 31 Juli 2020.

30 Handayani, Sri Niken 2020, 'Pelaku Ekonomi Kreatif Optimistis Industri Film Bangkit Pasca-Pandemi COVID-19', Swa.co.id, 16 April 2020.

31 Radius, Dwi Bayu 2020, 'Bergandeng Tangan demi Keberlanjutan', kompas.id, 27 September 2020

32 Ridhoi, Muhammad Ahsan 2020, 'Ragam 'New Normal' Industri Film Pasca-Pandemi Corona', Katadata.co.id, 19 Mei 2020.

33 Idem.

6. Festival dan Kompetisi Film di Masa Pandemi: Minim Tatap Muka, Namun Semakin Terbuka

Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal, termasuk bagaimana kita mengapresiasi film. Festival film, yang selama ini menjadi medium tatap muka antara pembuat film dan penontonnya, juga harus beradaptasi. Ada yang memilih untuk menunda, namun ada juga yang tetap bertahan. Penyelenggaraan festival film secara daring kini menjadi opsi.

Platform daring masih merupakan barang baru bagi festival film. Festival film yang ada di Indonesia awalnya jarang mempertimbangkan platform daring ini. Koneksi internet seringkali menjadi pertimbangan utama. Terlebih disparitas konektivitas internet di Indonesia sangat tinggi. Namun, minimnya sponsor atau funding yang mau mendanai festival film di masa pandemi, serta pelarangan kerumunan di berbagai tempat, membuat penyelenggara festival film memilih platform daring agar tetap dapat hadir di masa pandemi COVID-19. “Keputusan festival Madani dilakukan *full online* karena lebih efisien. Serta, belum terbiasa handle penonton jika tidak menaati protokol kesehatan. Ruang bioskop belum juga belum dibuka. *Open air cinema* kendalanya biaya besar sekali,” ujar Sugar Nadia, Direktur Madani Film Festival 2020.³⁴

Berbagai strategi dilakukan di dalam menyelenggarakan festival secara daring ini. Untuk menekan anggaran, Madani melakukan pengambilan film arsip/klasik agar biaya lebih murah. Selain itu, bekerja sama dengan platform digital yang sudah tersedia juga menjadi strategi baru seiring dengan berkembangnya layanan OTT di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan Festival Film Madani terhadap film-film yang sudah ada di platform Klik Film.

“Membingkai film-film yang sudah ada di sana. Jadi *win-win solution*. Masyarakat bisa nonton dari mereka, sedangkan bingkainya sudah jelas sesuai konteks yang dibentuk Madani. Termasuk mengajak diskusi tokoh-tokoh yang ada di film-film platform online tersebut, seperti Rhoma Irama.”³⁵

34 Sugar Nadia, Direktur Festival Madani Film Festival. Diwawancarai secara daring oleh Timothy Tirta pada 27 November 2020.

35 Idem.

Bentuk kerja sama ini turut dirasakan oleh penyedia platform yang sudah ada sebelumnya, seperti Viddsee. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Arie Kartikasari, Perwakilan Viddsee di Indonesia:

“Tahun lalu, kerjasama dengan festival tidak ada. Tahun ini tinggi, meski secara formal hanya tiga festival, Ucifest, Tanjung Pinang dan Madani. Tapi dari segi interaksi, tahun ini paling tinggi dibanding sebelum-belumnya. Kenapa cuma tiga, karena nggak semua festival sudah siap dengan sistem benar-benar daring.”³⁶

Penyelenggaraan festival film secara daring ini justru membuat jangkauan penonton menjadi lebih luas. Hal ini turut dirasakan oleh Festival Film Dokumenter (FFD) Yogyakarta dan Madani Film Festival.

“Kelebihan festival online ini, jangkauan penonton lebih luas, yang sebelumnya penonton harus datang ke Jogja sekarang dari daerah-daerah lain bisa menikmati festival dengan nyaman di rumah masing-masing. Jadi jangkauan penonton lebih beragam dan lebih luas,” kata Anita Reza Zein, Direktur FFD.³⁷

“Pada tahun ini, dengan *full online*, penonton makin bertambah. Mereka yang pencinta buku dan pencinta *stand up comedy*, jadi tahu ada tema dan konten Madani. Beberapa orang pencinta buku atau penonton *stand up comedy* ikut nonton. Ada juga peneliti-peneliti link dari Mas Garin di luar negeri bisa ikut join diskusi dengan Zoom” tambah Sugar Nadia dari Madani Film Festival.³⁸

Luasnya jangkauan penonton dibandingkan penyelenggaraan secara konvensional menginspirasi penyelenggara festival untuk mewujudkan model festival hibrid di masa depan, yakni menggabungkan platform daring dan tatap muka langsung secara bersamaan. Model daring dan konvensional yang diselenggarakan secara bersamaan ini diyakini dapat memberikan pengalaman baru yang positif.

36 Arie Kartikasari, Content Creator Community Manager Viddsee. Diwawancarai secara daring oleh Timothy Tirta pada 28 November 2020.

37 Anita Reza Zein, Direktur Festival Film Dokumenter Jogjakarta. Diwawancarai secara daring oleh Raditya Mahendra Putra pada 2 Desember 2020.

38 Sugar Nadia, Direktur Festival Madani Film Festival. Diwawancarai secara daring oleh Timothy Tirta pada 27 November 2020

Sayangnya, penyelenggaraan festival film secara daring ini masih dihadapi berbagai kendala. Selain pendanaan, risiko pembajakan masih menjadi kekhawatiran penyelenggara festival film daring. Beberapa mitigasi pun telah coba dilakukan, misalnya dengan kerja sama platform-platform yang menyediakan jaminan keamanan dari pembajakan seperti yang dilakukan oleh Festival Film Dokumenter.

“Akhirnya kita mempertimbangkan eventive dan shift32, eventive lebih murah karena kita bisa memilih *tools* mana saja yang bisa digunakan dan tidak digunakan. Selain itu eventive juga menawarkan *security* DRM yang membuat film lebih susah *di-download* dan juga ada *watermark* yang bisa *di-custom*. Jika pengguna melakukan *screen capture* akan terlihat *watermark* yang bisa spesifik memperlihatkan *user* mana dengan *IP address* mana yang melakukan *screen capture*,” kata Anita Reza Zein dari FFD.³⁹

Sebagai penyedia platform, Vidsee sudah menjalin kerja sama terlebih dahulu dengan korporasi besar seperti Facebook dan Youtube untuk menjamin keamanan konten di platform mereka dari pembajakan.

“Kami bekerjasama dengan Google dan Youtube, jadi setiap film yang masuk Vidsee akan dapat “sidik jari” digital. Di Youtube dan Facebook *ter-detect* secara langsung. Jadi itu garansi bahwa *screening* Vidsee dan Youtube Vidsee aman dari pembajakan,” kata Arie Kartikasari dari Vidsee.⁴⁰

Dari praktik ini, terdapat berbagai harapan dan dukungan dari pemerintah terhadap penyelenggaraan festival film ini, baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Terlebih, festival-festival yang ada juga memiliki tujuan untuk mendorong keharmonisan dan keberagaman yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi akhir-akhir ini.

“Harapannya, misi Madani ini didukung pemerintah. Kan ini tujuannya untuk masyarakat Indonesia, untuk karakter bangsa Indonesia. Kalau pemerintah bisa edukasi dan memasukkan ke kurikulum sekolah, atau bahkan jadi diskusi sehari-hari pemerintahan, akan sangat baik sehingga semangat Madani Festival bisa digunakan,” kata Sugar Nadia dari Madani Film Festival.⁴¹

39 Anita Reza Zein, Direktur Festival Film Dokumenter Jogjakarta. Diwawancarai secara daring oleh Raditya Mahendra Putra pada 2 Desember 2020.

40 Arie Kartikasari, Content Creator Community Manager Vidsee. Diwawancarai secara daring oleh Timothy Tirta pada 28 November 2020.

41 Sugar Nadia, Direktur Festival Madani Film Festival. Diwawancarai secara daring oleh Timothy Tirta pada 27 November 2020.

Secara global, pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh festival film menunda atau mengubah format festival film yang selama ini dilakukan. Cannes Film Festival misalnya, yang awalnya memutuskan untuk menunda penyelenggaraan, lantas memilih mengubah format festival film dengan skala yang lebih kecil. Imbasnya, hilangnya potensi pendapatan kota sekitar 940 juta euro dari perubahan penyelenggaraan festival tersebut.⁴²

Dari aspek kontribusi terhadap ekonomi, Indonesia memang belum memiliki festival film yang menyerupai Cannes. Atau, belum ada studi yang menghitung kontribusi penyelenggaraan festival film yang ada terhadap pendapatan suatu kota di Indonesia.

Dari praktik ini, terdapat berbagai harapan dan dukungan dari pemerintah terhadap penyelenggaraan festival film ini, baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Terlebih, festival-festival yang ada juga memiliki tujuan untuk mendorong keharmonisan dan keberagaman yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi akhir-akhir ini. Sayangnya, pemerintah cenderung baru memberikan dukungan pendanaan di akhir tahun dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini membuat perencanaan penyelenggaraan festival menjadi sulit terlaksana dan tidak berkelanjutan.

42 euronews, "'Defiant' Cannes Film Festival 2020 kicks off amid coronavirus restrictions," 2020, <https://www.euronews.com/2020/10/27/defiant-cannes-film-festival-2020-kicks-off-amid-coronavirus-restrictions>.

7. Epilog: Industri Film yang Hidup Bersama Pandemi

Meskipun penyebaran dampak pandemi tidak sama rata di tiap wilayah Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya menurut data FI tahun 2019, sebesar 62 persen dari seluruh layar bioskop berada di Jawa, pulau yang menghadapi dampak pandemi paling parah. Kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar pun dibuat dan diterapkan lebih ketat di pulau ini, karena itu tidak ada perbedaan signifikan pada buka atau tutupnya bioskop di pulau-pulau luar Jawa.

Memasuki pertengahan tahun, kebijakan pembatasan sosial diperlunak. Bioskop sempat direncanakan buka kembali pada 29 Juli, akan tetapi batal setelah mempertimbangkan laju peningkatan infeksi yang tidak menurun seperti harapan. Setiap minggu, jika melihat data tahun 2019, ada antara 3 sampai 5 judul film Indonesia yang diluncurkan di bioskop. Penutupan bioskop selama 7 bulan berarti hilangnya paling tidak 60 persen jam tayang dalam setahun dan sekitar 15 ribu pekerja turun drastis penghasilannya.

Belum ada perhitungan rinci yang dinyatakan secara resmi dari asosiasi produser film Indonesia mengenai berapa judul film yang tidak bisa ditayangkan ke bioskop hingga pertengahan Oktober 2020. Kalau melihat pola jumlah film Indonesia yang ditayangkan di bioskop rata-rata adalah 2 judul tiap minggu sejak tahun 2018 dan dengan menimbang jumlah judul yang diproduksi film sejak Maret 2020 berkurang katakanlah 50 persen, maka bisa diperkirakan paling tidak ada sekitar 5-30 judul film Indonesia yang tertahan masuk ke bioskop. Sementara itu, sudah barang tentu ada juga tumpukan judul film impor yang antri masuk ke layar bioskop. Perlu diamati lebih lanjut bagaimana dampak penumpukan jumlah film Indonesia pada perimbangan persentase tayang di bioskop jika dibandingkan dengan film impor. Biasanya film Indonesia mendapat dampak positif ketika jumlah film impor menurun karena bisa mendapatkan masa tayang lebih lama dan jumlah layar lebih banyak. Akan tetapi kali ini di tengah pandemi, persoalannya apakah para produser juga mau mengambil risiko menayangkan film sementara sewaktu-waktu bioskop bisa saja ditutup kembali kalau laju peningkatan infeksi bertambah cepat dan masif?

Perlu ditimbang juga bahwa produksi film pun menjadi macet. Kerugian pembatalan atau penundaan produksi serta kenaikan biaya produksi untuk protokol kesehatan dan mitigasi ketidakpastian mobilitas atau larangan berkumpul adalah hambatan yang tak bisa diatasi produser berkantong kempes. Tanpa tambahan dana, ada kemungkinan produksi film-film independen beranggaran pas-pasan harus dibatalkan sampai waktu

yang tak bisa ditentukan. Kalau ini terjadi, maka keragaman konten yang sudah menunjukkan dinamika positif pada tahun 2018 dan 2019 akan surut kembali karena film-film yang bisa diproduksi hanya berasal dari segelintir perusahaan yang bermodal besar. Bagi pekerja film yang hidup dari proyek ke proyek dan masih beruntung dapat panggilan kerja, perpanjangan waktu produksi film akan membuat jumlah proyek yang bisa dikerjakan menjadi lebih sedikit. Artinya tingkat pendapatan akan berkurang dan jumlah pekerja baru yang dapat terserap akan turun drastis.

Ketika bioskop terpaksa ditutup dan aktivitas luar rumah dihentikan di banyak kota, menonton film di bioskop berpindah ke moda menonton melalui platform online. Platform nonton online menjadi kanal baru untuk eksibisi film dan menjadi alternatif pilihan buat para pembuat film yang terhambat menjajakan filmnya. Perusahaan platform menonton daring multinasional lebih leluasa berbisnis di Indonesia dan perusahaan lokal pun tumbuh. Di masa depan, yang menarik diamati adalah apakah OTT di Indonesia akan menjadi kanal paralel distribusi (dan produksi) film di samping bioskop, atau tetap menjadi kanal *second run* atau solusi sementara saja. Bagi produser, OTT belum memberikan penghasilan yang sama tinggi dengan bioskop. Tapi di sisi lain, pertumbuhan bioskop tidak cukup cepat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan daya beli calon penonton pun belum tentu sepadan dengan harga layanan OTT.

Di tengah masa sulit, bukan saja tumbuh siasat baru berbisnis film, tapi juga kelihatan upaya-upaya solidaritas sesama pekerja film. Di satu sisi ini adalah pertanda positif nilai-nilai kemanusiaan di dalam komunitas film, di sisi yang menunjukkan absennya peran pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi pelaku di sektor ini. Dalam merumuskan kebijakan untuk industri film pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa kebutuhan ini:

- Mekanisme dukungan bagi pekerja industri film yang jumlahnya dapat mencapai 50 ribu orang (sektor produksi dan eksibisi), dengan mengutamakan pekerja harian berpendapatan rendah. Dukungan ini dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, subsidi atau stimulus. Penentuan alat ukur yang tepat menjadi keharusan agar manfaat dukungan bisa sampai kepada segmen pekerja harian tersebut.
- Menetapkan keringanan pajak dan/atau subsidi untuk sektor eksibisi dan produksi film yang terhambat aliran pemasukannya.
- Melakukan monitoring perimbangan jatah tayang antara film Indonesia dengan film impor serta intervensi yang positif untuk menjaga keberlangsungan peluang ekonomi film Indonesia.

Industri film Indonesia pada akhir tahun 2020 berada dalam moda bertahan hidup. Tanpa kebijakan yang mendukung, industri film yang tadinya berada di posisi jaya akan tersungkur. Kalaupun pulih, kejayaan yang sama akan sulit dicapai dalam waktu singkat.



Kredit

Pengarah: R. Kurleni Ukar
Penanggung Jawab: Wawan Rusiawan
Penanggung Jawab Teknis: Dian Permanasari
Koordinator Teknis dan Administrasi:
Joko Bramantyo
Tim FI & Kawan kawan Media

Tim Penyusun Laporan dan Videographic:

Agus Mediarta - penulis & pengolah data
Amerta Kusuma & tim Kawan Kawan Media Baharu - produksi videographic Deden
Ramadani - penulis & pewawancara
Klara Virencia - pewawancara
Levriana Yustriani - penulis, pewawancara & pengelola proyek
Lisabona Rahman - penulis & penyunting
Raditya Mahendra Putra - pewawancara
Timothy Tirta - pewawancara
JB Kristanto - pembaca
Lintang Gitomartoyo - pembaca

Penyunting:
Lisabona Rahman
Dian Permanasari
Novan Bachtiar

katalog_fi@filmindonesia.or.id

2020

PEMANDANGAN UMUM INDUSTRI FILM INDONESIA


Ciptaan ini dilisensikan di bawah lisensi
Creative Commons Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan 4.0 Internasional.
Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>



CC BY-NC-ND 4.0

2020



 *film indonesia*

kawankawan
M E D I A